
Sosialisasi Pemasangan CCTV Tambahan pada Ruang Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi

Socialization of the Installation of Additional CCTV in the Independence Development Room to Increase the Effectiveness of Independence Development in Correctional Institutions Class IIA Banyuwangi

Monica Astia Theresia Panjaitan^{1*}, Kharisma Huril'in Firdaus², Prasetya Adhi Nugraha³, Vivi Sylviani Biafri⁴, Ali Muhammad⁵, Imaduddin Hamzah⁶

¹⁻⁶ Prodi Bimbingan Kemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

Alamat : Jl. Raya Gandul No.4, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat

Penulis Korespondensi: astiatia0311@gmail.com

Article History:

Received: Januari 03, 2025;

Revised: Januari 26, 2025;

Accepted: Februari 17, 2025;

Online Available: Februari 19, 2025;

Keywords: *cctv, independence, training, correctional, system*

Abstract: *The development of self-reliance among correctional inmates faces challenges in terms of surveillance effectiveness and order within correctional institutions. One of the main issues encountered is the lack of an optimal surveillance system, which can hinder the rehabilitation process and increase the risk of rule violations. To address this issue, a socialization program for the installation of additional CCTV cameras in the Self-Reliance Development Room at Banyuwangi Class IIA Correctional Facility was conducted. The program aimed to enhance surveillance effectiveness, create a safer rehabilitation environment, and encourage behavioral changes among inmates. The methods used in this community service project included needs analysis, coordination with correctional authorities, conducting socialization sessions for officers and inmates, and evaluating the impact of CCTV installation. The results indicate that the installation of CCTV contributes to improving inmate discipline, reducing rule violations, and strengthening transparency and accountability in the rehabilitation process. Additionally, this program fosters the emergence of local leaders among inmates who play a role in maintaining order. These findings align with social control and social learning theories, which emphasize that effective surveillance can shape individual behavior and promote compliance with established norms. In conclusion, the implementation of surveillance technology in the correctional system can serve as a strategic step in supporting inmate rehabilitation and social reintegration.*

Abstrak

Pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan memiliki tantangan dalam hal efektivitas pengawasan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya sistem pengawasan yang optimal, sehingga dapat menghambat proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko pelanggaran tata tertib. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan sosialisasi pemasangan CCTV tambahan di Ruang Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas IIA Banyuwangi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih aman, serta mendorong perubahan perilaku warga binaan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi analisis kebutuhan, koordinasi dengan pihak Lapas, pelaksanaan sosialisasi kepada petugas dan warga binaan, serta evaluasi terhadap dampak yang ditimbulkan pasca pemasangan CCTV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan CCTV berkontribusi dalam meningkatkan disiplin warga binaan, mengurangi tingkat pelanggaran tata tertib, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembinaan. Selain itu, program ini juga mendorong munculnya pemimpin lokal di kalangan warga binaan yang berperan dalam menjaga ketertiban. Temuan ini sejalan dengan teori kontrol sosial dan pembelajaran sosial yang menekankan bahwa pengawasan yang efektif

dapat membentuk perilaku individu dan menciptakan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Kesimpulannya, penerapan teknologi pengawasan dalam sistem pemasyarakatan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan.

Kata Kunci: CCTV, pembinaan, kemandirian, pemasyarakatan

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran penting dalam proses pembinaan narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan sikap yang lebih baik. Salah satu fokus utama dalam pembinaan narapidana adalah program pembinaan kemandirian. Program ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kerja dan sikap positif narapidana agar dapat hidup mandiri setelah mereka menyelesaikan masa hukumannya.

Namun, pelaksanaan program pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan dalam pengawasan dan monitoring kegiatan pembinaan. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan kurang efektifnya pelaksanaan program, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembinaan kemandirian.

Pengawasan yang optimal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap narapidana mengikuti program dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat merusak tujuan pembinaan. Dalam konteks ini, teknologi pengawasan seperti Closed Circuit Television (CCTV) dapat menjadi solusi yang efektif. Penggunaan CCTV tidak hanya membantu petugas lapas dalam memantau aktivitas narapidana secara real-time, tetapi juga dapat memberikan bukti rekaman apabila terjadi insiden atau pelanggaran.

Saat ini, meskipun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi telah memiliki beberapa CCTV yang terpasang, jumlah dan cakupan area yang terpantau masih terbatas. Beberapa ruangan penting, termasuk ruang pembinaan kemandirian, belum sepenuhnya terpantau oleh CCTV. Hal ini membuka peluang terjadinya aktivitas yang tidak terawasi dengan baik, yang dapat mengganggu proses pembinaan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembinaan kemandirian, perlu dilakukan sosialisasi pemasangan CCTV tambahan pada ruang pembinaan kemandirian. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak terkait, baik petugas lapas maupun narapidana, tentang pentingnya pengawasan yang optimal dalam mendukung keberhasilan program pembinaan kemandirian.

Dengan pemasangan CCTV tambahan, diharapkan pengawasan terhadap narapidana selama mengikuti program pembinaan kemandirian dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga tujuan pembinaan dapat tercapai secara maksimal. Selain itu, adanya CCTV juga diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan disiplin di kalangan narapidana, serta meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan proses pembinaan.

2. METODE

Praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial dilakukan melalui penerapan metode bimbingan kemasyarakatan yang diantaranya: Community Base Correction, Pengembangan Masyarakat/Pengembangan Organisasi, dan Pengembangan MasyarakatliLokal, Perencanaan Sosial, serta Analisis Kebijakan Reintegrasi Sosial. Adapun teknik yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial, antara lain: Community Invollvement (CI), Neighborhood Survey Study (NSS), Community/Night Meeting Forum (CMF), Participatory Rural Appraisal (PRA), The Sustainable Livelihoods (SL), Ziel-Orientierte Project Planning (ZOPP), Technology of Participation (ToP), Advokasi Sosial (Social advocacy).

Kegiatan kuliah kerja nyata (Intervensi Makro) Progam Pendidikan Sarjana Terapan Ilmu Pemasarakatan, program studi Bimbingan Kemasyarakatan, diselenggarakan dengan menggunakan sistem block placement, dimana taruna selama 1 (satu) bulan melakukan aktivitas praktikum di lapangan. Kegiatan praktikum terbagi dalam 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu: Tahap Kegiatan Pra-lapangan (Persiapan), Tahap Kegiatan Lapangan, dan Tahap Pasca Lapangan (kegiatan finalisasi penulisan laporan, ujian lisan, perbaikan dan penyempurnaan, pengesahan dan penyerahan laporan praktikum). Kegiatan Pra Lapangan dan Kegiatan Pasca Lapangan dilakukan di Kampus Politeknik Ilmu Pemasarakatan. Sedangkan kegiatan lapangan dilakukan dalam masyarakat secara sosiologis dan administrasi termasuk pada kategori pedesaan.

Peserta kuliah kerja nyata (Intervensi Makro) adalah Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan Program Pendidikan Sarjana Terapan Ilmu Pemasarakatan Semester V, yang telah lulus Praktikum I dan II, sudah melakukan kontrak kredit semester dalam mata kuliah kuliah kerja nyata. Peserta praktikum dihimpun dalam kelompok-kelompok praktikum. Jumlah taruna dalam setiap kelompok praktikan kisaran 3 – 8 orang yang ditetapkan oleh Labbinkemas dan setiap kelompok praktikan ditempatkan di satu desa atau Instusi Pemasarakatan lokasi praktikum.

Taruna peserta kuliah kerja nyata (Intervensi Makro) selama melaksanakan praktik dibimbing oleh dosen/tenaga pendidik Politeknik Ilmu Pemasarakatan. Pembimbing kuliah kerja nyata (Intervensi Makro) terdiri atas “Supervisor” dan “Liaison” yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan. Selain itu, selama di lapangan, kelompok praktikan didampingi oleh seorang Pendamping Lapangan. Pendamping Lapangan tersebut adalah aparatur pemerintah desa atau tokoh masyarakat di lokasi praktikum yang telah ditunjuk oleh Kepala Desa, atau Mentor jika praktikum di laksanakan di instusi pemasarakatan.

3. HASIL

Proses pengabdian masyarakat melalui sosialisasi pemasangan CCTV tambahan pada Ruang Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi telah dilaksanakan secara bertahap dengan pendekatan yang sistematis dan partisipatif. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan dengan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi. Peningkatan pengawasan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih aman, disiplin, dan kondusif, sehingga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan secara lebih optimal.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan teknis pemasangan CCTV, koordinasi dengan pihak Lapas, sosialisasi kepada petugas dan warga binaan, hingga proses evaluasi terhadap dampak pemasangan CCTV tersebut. Tahap awal dimulai dengan analisis kebutuhan dan penentuan titik-titik strategis pemasangan CCTV berdasarkan tingkat aktivitas serta risiko dalam Ruang Pembinaan Kemandirian. Setelah itu, dilakukan koordinasi dengan pihak Lapas, terutama petugas keamanan dan pembinaan, untuk mendapatkan izin serta menyusun strategi penerapan sistem pemantauan ini agar dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di institusi pemasarakatan.

Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kepada petugas pemasarakatan mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi ini dalam mendukung tugas pengawasan dan pembinaan. Dalam sesi ini, diberikan pelatihan teknis terkait cara memantau CCTV, menganalisis rekaman, serta merespons kejadian yang terpantau melalui sistem tersebut. Selain itu, dilakukan juga edukasi kepada warga binaan mengenai tujuan pemasangan CCTV, yaitu sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih aman, bukan sekadar alat kontrol semata. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi resistensi atau ketidaknyamanan di kalangan warga binaan.

Dalam dinamika proses pendampingan, ditemukan berbagai tantangan yang harus diatasi, seperti keterbatasan sumber daya untuk pemasangan CCTV tambahan, penyesuaian dengan kebijakan internal Lapas, serta adanya kekhawatiran dari sebagian warga binaan bahwa pengawasan yang lebih ketat dapat membatasi kebebasan mereka dalam beraktivitas. Namun, melalui pendekatan komunikasi yang persuasif dan partisipatif, resistensi ini berhasil diminimalkan. Pihak pendamping bersama petugas Lapas melakukan diskusi terbuka dengan warga binaan, menjelaskan manfaat pemasangan CCTV dalam melindungi mereka dari potensi konflik antar sesama, meminimalisir penyalahgunaan fasilitas, serta meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan program pembinaan.

Selain pendekatan komunikasi, dilakukan pula demonstrasi teknis mengenai penggunaan sistem CCTV, sehingga warga binaan dapat memahami bahwa teknologi ini tidak hanya mengawasi, tetapi juga dapat membantu mereka dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman. Sebagai contoh, dengan adanya CCTV, apabila terjadi permasalahan atau perselisihan, pihak Lapas dapat dengan mudah menelusuri kejadian tersebut dan mengambil tindakan yang adil berdasarkan bukti yang terekam. Hal ini juga diharapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran disiplin yang sering terjadi akibat kurangnya sistem pengawasan yang efektif sebelumnya.

Perubahan sosial yang diharapkan dari program ini mulai terlihat dalam beberapa aspek. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran warga binaan tentang pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari proses rehabilitasi mereka. Dengan adanya pengawasan yang lebih baik, mereka menjadi lebih berhati-hati dalam berperilaku serta lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembinaan secara positif. Selain itu, pemasangan CCTV juga mendorong munculnya budaya saling mengawasi antar warga binaan, di mana mereka lebih aktif dalam menjaga ketertiban bersama.

4. DISKUSI

Pelaksanaan sosialisasi pemasangan CCTV tambahan pada Ruang Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi menunjukkan bahwa teknologi pengawasan dapat berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan warga binaan. Hasil pengabdian ini sejalan dengan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (1969), yang menyatakan bahwa semakin kuat sistem pengawasan yang diterapkan, semakin kecil kemungkinan individu melakukan pelanggaran. Dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan teknologi seperti CCTV tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai instrumen yang membantu membangun disiplin dan kepatuhan

warga binaan terhadap aturan yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh penelitian Foucault (1977) dalam *Discipline and Punish*, yang menjelaskan bahwa sistem pengawasan yang ketat menciptakan kesadaran bagi individu bahwa mereka selalu dalam pengawasan, sehingga secara tidak langsung menginternalisasi norma dan aturan yang berlaku.

Selain berkontribusi dalam penguatan kontrol sosial, pemasangan CCTV juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan. Transparency International (2018) menekankan bahwa keberadaan sistem pengawasan berbasis teknologi dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepercayaan terhadap institusi. Dengan adanya rekaman CCTV, setiap peristiwa yang terjadi di dalam Ruang Pembinaan Kemandirian dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan pihak Lapas dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Welsh dan Farrington (2009), yang menemukan bahwa penggunaan CCTV di berbagai institusi dapat mengurangi tingkat pelanggaran hingga 16% karena adanya peningkatan rasa diawasi dan tanggung jawab kolektif.

Dari perspektif perubahan sosial, hasil pengabdian ini menunjukkan adanya transformasi perilaku di kalangan warga binaan, yang dapat dijelaskan melalui teori pembelajaran sosial dari Bandura (1977). Dalam teorinya, Bandura menjelaskan bahwa individu cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan lingkungan dan sistem yang diterapkan. Dengan adanya CCTV, warga binaan mulai menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya menjaga ketertiban, menghindari konflik, serta berpartisipasi secara lebih aktif dalam program pembinaan kemandirian. Keberadaan sistem pengawasan ini juga mendorong terbentuknya pemimpin lokal (*local leader*) di kalangan warga binaan yang berperan dalam menjaga disiplin serta mendukung terciptanya budaya kepatuhan secara kolektif.

Temuan ini juga berkaitan dengan konsep teori institusional dari Scott (2008), yang menjelaskan bahwa perubahan dalam suatu institusi dapat terjadi melalui mekanisme regulatif, normatif, dan kognitif. Dalam kasus ini, pemasangan CCTV memperkuat mekanisme regulatif melalui peningkatan pengawasan, mendukung aspek normatif dengan membangun budaya kepatuhan, serta mendorong perubahan kognitif dengan menciptakan kesadaran baru mengenai pentingnya kedisiplinan dan keamanan di lingkungan pembinaan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dampak teknis dalam aspek pengawasan, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sosial yang lebih luas dalam sistem pemasyarakatan.

Lebih lanjut, program ini juga mencerminkan prinsip-prinsip teori rehabilitasi dalam masyarakat, yang menekankan bahwa tujuan utama pemidanaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk membina dan mengembalikan individu ke masyarakat dengan keterampilan serta perilaku yang lebih baik (Cullen & Gendreau, 2000). Peningkatan efektivitas pembinaan melalui teknologi pengawasan memungkinkan warga binaan menjalani program rehabilitasi dengan lebih terstruktur dan disiplin. Hal ini mendukung temuan penelitian Liebling *et al.* (2011) yang menyatakan bahwa lingkungan masyarakat yang dikelola dengan baik, termasuk dengan pemanfaatan teknologi pengawasan, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikologis warga binaan serta menurunkan tingkat residivisme.

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam sistem masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih aman, transparan, dan berorientasi pada rehabilitasi. Pemasangan CCTV tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan, tetapi juga berkontribusi pada perubahan perilaku warga binaan dan memperkuat tata kelola institusi masyarakat. Dengan didukung oleh berbagai perspektif teoritis, program ini dapat menjadi model yang dapat diadopsi oleh Lapas lain dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan kemandirian bagi warga binaan.



Gambar 1. Mempelajari proses integrasi (CB, PB, CMB)



Gambar 2. Penyerahan CCTV kepada pejabat terkait



Gambar 3. Proses pemasangan CCTV



Gambar 4. Hasil gambar CCTV yang dapat dipantau melalui aplikasi

5. KESIMPULAN

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berjudul "Sosialisasi Pemasangan CCTV Tambahan pada Ruang Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Banyuwangi" telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pemasangan CCTV tambahan telah berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan di Lapas Kelas IIA Banyuwangi. Sosialisasi yang dilakukan terhadap petugas lapas dan narapidana telah membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pengawasan dalam mendukung program pembinaan kemandirian. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini juga menemui beberapa tantangan, seperti resistensi awal dari narapidana dan beberapa kendala teknis dalam penggunaan CCTV. Namun, tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan partisipatif dan evaluasi berkelanjutan, yang memungkinkan penyesuaian dan perbaikan secara tepat waktu.

Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Peningkatan Pelatihan Petugas

Untuk memaksimalkan manfaat dari pemasangan CCTV, diperlukan pelatihan lebih lanjut bagi petugas lapas mengenai teknik pemantauan dan penggunaan teknologi CCTV secara efektif. Pelatihan ini juga harus mencakup aspek-aspek teknis dan non-teknis agar petugas dapat mengatasi berbagai situasi yang mungkin muncul.

2. Pemeliharaan dan Perbaikan Teknologi

CCTV yang telah dipasang perlu mendapatkan pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa perangkat tersebut berfungsi dengan baik. Selain itu, perbaikan teknis yang

diperlukan harus segera dilakukan untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dan memastikan sistem pengawasan tetap efektif.

3. Pengembangan Sistem Pengawasan Terintegrasi

Lapas dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem pengawasan terintegrasi yang menggabungkan CCTV dengan teknologi lainnya, seperti sensor gerak dan alarm, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan keamanan.

4. Evaluasi Berkala

Penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas CCTV dalam mendukung pembinaan kemandirian di Lapas. Evaluasi ini dapat digunakan untuk menilai dampak jangka panjang dari sistem pengawasan yang baru serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

5. Penguatan Komunikasi dan Sosialisasi

Diperlukan penguatan dalam komunikasi dan sosialisasi yang terus-menerus dengan narapidana dan petugas lapas untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan manfaat dari sistem pengawasan yang baru, serta untuk meminimalisir resistensi yang mungkin terjadi di masa depan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Heni Yuwono, Bc.IP., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
2. Bapak Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.I selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.
3. Ibu Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si selaku Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan.
4. Bapak Agus Wahono, A.Md.I.P., S.H., M.H selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.
5. Bapak Wahyu Tetuka, A.Md.I.P., S.H., M.Hum. selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik sekaligus mentor di UPT.
6. Seluruh pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya laporan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Darwis, A. M. F. (2020). Penerapan konsep community based correction (CBC) dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/download/5712/4532/11424>
- Fajriah, S., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). Efektivitas pelaksanaan pengawasan warga binaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 7(1), 6717–6729. <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/06/Jurnal%20Sofi%20%2806-18-19-05-59-22%29.pdf>
- Novitasari, Y. (2021). Pembinaan kemandirian dalam membangun kepercayaan diri narapidana di masa pandemi COVID-19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2), 485–493. <https://media.neliti.com/media/publications/548234-none-136d0737.pdf>
- Pratama, P. B., & Chotib, H. M. (2020). Efektivitas penggunaan CCTV sebagai sistem pengawasan dalam meningkatkan keamanan lingkungan kampus IAIN Kendari. *Edu-Mandara*, 1(1), 1–10. <https://ejournal.edu-trans.org/mandara/article/viewFile/10/11>
- Sipahutar, H., & Siallagan, J. H. (2018). Analisa pengaruh pengawasan kinerja pengamanan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sibolga. *Juripol*, 1(1), 81–90. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=730241&title=Analisa+Pengaruh+Pengawasan+Kinerja+Pengamanan+Warga+Binaan+Lembaga+Pemasyarakatan+LAPAS+Kelas+II+A+Sibolga&val=11390>
- Utoyo, M. (2015). Konsep pembinaan warga binaan pemasyarakatan: Analisis pembinaan narapidana untuk mengurangi tingkat residivisme. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37–48. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/download/25774/7283
- Yuliana, N. (2021). Pembinaan kemandirian dalam membangun kepercayaan diri narapidana di masa pandemi COVID-19. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2), 485–493. <https://media.neliti.com/media/publications/548234-none-136d0737.pdf>